COVID-19 DAN PROBLEM RUMAH SAKIT

Rabu, 08 April 2020 - Zayanti Mandasari

Hingga 07 April 2020, jumlah korban *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia mencapai 2.738 kasus, dengan 204 orang diantaranya sembuh dan 221 orang lainnya meninggal dunia. Dari data itu, terlihat bahwa masih lebih banyak korban yang meninggal dibandingkan korban yang sembuh. Angka kematian karena Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.

Sementara di Provinsi Kalsel, terdapat jumlah orang positif korona sebanyak 22 orang, dengan 19 orang dirawat dan 3 orang meninggal dunia. Kita berharap, semoga pasien yang positif tadi dapat cepat sembuh dan sehat seperti sediakala.

Ada lebih dari 180 negara yang terjangkit virus ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga 07/04/2020, jumlah kasus secara global: 1.425.837 positif terjangkit, 81.977 orang meninggal dunia dan 301.828 orang sembuh.

Penyebaran Virus Corona pun berdampak ke berbagai sektor. Mulai dari ekonomi, pariwisata, trasportasi, politik hingga pelayanan publik. Dari sisi ekonomi, kelangkaan berbagai macam kebutuhan mulai dirasakan. Bahkan di beberapa tempat, terjadi *panic buying* dari masyarakat.

Tidak hanya itu, *hand sanitizer* dan masker juga menjadi barang langka. Kalau pun ada, harganya sangat mahal. Sama halnya dengan alkohol, dimana ketika *hand sanitizer* langka, maka masyarakat akan membuat sendiri *hand sanitizer* . Namun ini juga bukan lah perkara mudah. Sebab alkohol di apotik juga terdampak menjadi kosong. Kalaupun ada, harga per liternya dapat mencapai Rp. 120.000,-.*Thermo gun* pun demikian. Dari harga awalnya hanya ratusan ribu, kini mencapai jutaan. Itu pun barangnya sangka langka.

Dari sisi politik, Covid-19 berdampak pada ditundanya pilkada serentak, begitu juga dengan pilkades. Agenda beberapa daerah yang sedang melaksanakan pemilihan kepala desa otomatis menjadi ditunda. Tapi ada juga yang nekat, seperti di Jawa Tengah, dimana pilkades tetap dijalankan, padahal penyebaran virus semakin cepat.

Pemerintah menghimbau agar saat ini dilakukan*social distancing (*pembatasan sosial). Belakang istilah ini diganti dengan *physical distancing* (pembatasan fisik). Yang dibatasi adalah jarak fisik seseorang dengan orang lain dalam rangka mencegah penularan virus. Namun interaksi sosial tetap bisa dijalankan, misalnya melalui telepon, video call, telekronfrensi dan sejenisnya.

Sektor pariwisata juga terdampak. Tempat wisata banyak yang ditutup. Hotel-hotel banyak yang kosong karena pertemuan dan rapat-rapat yang melibatkan orang banyak, tidak diperbolehkan. Juga terhadap transportasi. Tiket pesawat banyak yang dibatalkan. Terjadi penurunan penumpang sebesar hampir 70%.

Pemerintah menghimbau agar *physical distancing* diterapkan dengan maksimal. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

Di beberapa negara, seperti Malaysia, India, dan Amerika Serikat, sudah diterapkan kebijakan *lockdown* yang melarang warganya keluar rumah. Negara juga menutup perbatasannya sehingga tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negara.

Di Indonesia, *lockdown* total tidak diterapkan. Hanya berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menghimbau *Work From Home* bagi pegawai pemerintah dan pegawai swasta untuk bekerja dari rumah. Terutama bagi pegawai yang berusia di atas 50 tahun, pegawai yang sakit seperti flu, pegawai yang sedang hamil atau menyusui, dan juga pegawai yang berpergian ke kantor menggunakan transportasi publik. Bagi yang punya penghasilan tetap seperti pegawai, tidak masalah. Kantor masih membayar gajinya. Tapi bagaimana halnya dengan tukang ojek, buruh bangunan, pedagang?

Di DKI Jakarta, bagi mereka yang berpenghasilan rendah akan diberikan bantuan kebutuhan pokok per jiwa, berupa beras, mie instan, sarden dan minyak goreng. Kebijakan ini dinilai cukup berimbang. Karena ketika mereka dihimbau untuk tetap di rumah, maka otomatis tidak ada pemasukan., sehingga bantuan pemerintah sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta dirasa cukup visioner melihat situasi.

Sektor lain yang terdampak adalah pelayanan publik. Di tengah merebaknya Virus Corona di negara kita, pelayanan

publik harus tetap jalan. Namun tidak bisa semaksimal dalam keadaan normal. Berbagai kebijakan diambil agar pelayanan tetap berjalan. Misalnya pembatasan jam pelayanan. Pegawai yang rentan terpapar, disarankan untuk berkerja dari rumah. Menerapkan sistem *shift*. Ada jarak antara pengguna layanan dengan pemberi layanan. Mengatur jarak tempat duduk antar pengguna layanan..

Protokol pencegahan penyebaran Covid-19 juga diterapkan. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, masker dan *hand sanitizer.* Sebelum masuk ruang pelayanan, pengguna layanan diukur suhu tubuhnya. Jika di atas 38 derajat, maka disarankan untuk pulang dan memeriksakan kesehatannya.

Saat ini, pelayanan publik yang paling jadi sorotan adalah rumah sakit, terutama rumah sakit yang menjadi rujukan pasien corona. Di Kalsel sendiri, saat ini berstatus Tanggap Darurat Corona. Ada dua rumah sakit rujukan pasien Corona, yakni RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD Boejasin Pelaihari. Pemprov Kalsel sedang menyiapkan tambahan rumah sakit rujukan untuk mengantisipasi tingginya jumlah pasien yang positif terjangkit.

Kendala yang dihadapi rumah sakit rujukan yang ada di seluruh Indonesia adalah keterbatasan Alat Pelindungan Diri (APD), seperti masker N95, pelindung mata, baju pelindung/hazmat, sarung tangan, dan sepatu boot. Rumah sakit mulai kehabisan stok. Persediaan hanya ada untuk beberapa hari ke depan. Itupun kalau pasiennya tidak bertambah. Tidak hanya di Indonesia, keterbatasan APD ini juga terjadi di 186 negara yang terjangkit Virus Corona.

Perlindungan terhadap tenaga medis yang menangani pasien Corona lebih utama. Koran Tempo pada 06/04/2020 mencatat, setidaknya sudah ada 24 dokter yang meninggal di Indonesia karena terpapar virus saat merawaat pasien. Tentunya kita tidak ingin ada korban jatuh lagi dari tenaga medis. Karena tenaga medis inilah garda terdepan pelayanan. Kalau keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak dijamin dengan standar, maka jangan heran kalau mereka menolak memberikan layanan.

Ventilator untuk pasien juga terbatas. Alat ini membantu pasien yang sulit bernafas secara mandiri. Tidak semua rumah sakit rujukan menyediakan alat ini di ruang isolasi. Hal ini disebabkan karena harganya yang mahal, bahkan mencapai ratusan juta. Rumah sakit dengan kondisi sekarang, tidak bisa membeli alat tersebut.

Begitu juga dengan *Virus Transport Media* (VTM) atau media untuk membawa sampel SWAB. Rumah sakit rujukan pun kekurangan media ini. Bagaimana mengirimkan sampelnya, kalau tidak ada media untuk menampung hasil pengambilan sampel. Alat ini dikirimkan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat. Termasuk Alat Pelindung Diri, juga bantuan dari Kemenkes.

Selain masalah VTM, hasil pengujian sampel SWAB di laboratorium Kemenkes juga sangat lama. Rumah sakit menunggu antrian. Pengujian hanya dilakukan di Jakarta. Namun belakangan, pengujian sampel sudah bisa dilakukan di daerah.

Koordinasi dan komunikasi antara rumah sakit rujukan dengan rumah sakit di kabupaten/kota juga belum seirama. Rumah sakit di daerah merujuk pasien yang diduga positif Corona ke rumas sakit rujukan. Padahal hanya flu biasa. Karena telah dikategorikan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maka seluruh tindakan menggunakan standar, seperti melayani pasien yang sudah positif Corona. Komunikasi antara pusat dan daerah juga tersendat. Pusat tertutup soal data sebaran Covid-19. Selain itu, data petugas medis yang meninggal juga tidak terbuka. Pemprov DKI Jakarta lebih terbuka. Lebih dulu membuka mengenai data-data sebaran melalui website milik pemprov. Belakangan, inovasi ini dikritik pemerintah pusat dengan alasan tidak adanya keterpaduan. Komunikasi dianggap tidak melalui satu pintu.

Rumah sakit juga keteteran soal anggaran. Untungnya, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Walaupun agak terlambat, namun paling tidak, ada dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggunakan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Selain itu, pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan kedokteran bisa dipercepat. Pemda diharap tidak takut lagi membelanjakan anggaran, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat dan penanganan Covid-19. Hal ini karena keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi *(Salus Populi Suprema Lex Esto).*

Penecegahan penularan Covid-19 ini bukan hanya tugas pemerintah. Namun perlu dukungan dari masyarakat maupun dunia usaha. Ini adalah tugas kita bersama untuk mengurangi penyebarannya.

Kalau semua orang berdiam diri di rumah, maka penyebaran virus akan terhenti. Menurut data Kemenkes RI, rumah sakit di Indonesia hanya memiliki 321.544 tempat tidur. Jika yang terpapar di bawah angka itu, maka rumah sakit bisa merawat orang yang positif terpapar. Kemungkingan orang itu sembuh, semakin besar. Namun jika rumah sakit tidak bisa menampung, maka korban Corona akan terus berjatuhan.

Oleh sebab itu, masyarakat harus mengikuti imbauan pemerintah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Jika tidak penting, sebaiknya tetap di rumah agar kita tidak terpapar virus. Gunakan masker. Sering-sering cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*. Selain itu, hindari kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Namun jika sangat *urgent*, maka tetap harus mengikuti protokol pencegahan penyebaran Covid-19, misalnya dengan menerapkan *physical distancing*.

Akhirnya, kita berharap, semoga pandemi ini cepat berakhir.